

**PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Oleh :

Ria Liza Novita TH

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Ekonomi
pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2014**

ABSTRAK

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung?

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan rumus interval kelas yang dituangkan dalam bentuk distribusi frekuensi, selanjutnya analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan regresi linier sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa pengawasan fungsional mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan efektivitas pelaksanaan APBD sebesar 0,742, berada pada tingkat keeratan dalam kriteria kuat. Pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan APBD, dengan hasil pengujian student t, didapat harga t_{hitung} sebesar 6,736, jika dibandingkan dengan $t_{tabel} = 2,042$, maka $t_{hitung} (6,736) > t_{tabel} (2,042)$. Untuk melihat signifikan dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig. 0,000) ternyata lebih kecil dari Sign. = 0,05.

Kata Kunci : Pengawasan Fungsional, Pelaksanaan Anggaran, Badan Kepegawaian Daerah

ABSTRACT

The problem discussed in this paper is whether the functional supervision influences the effectiveness of the implementation of the Budget Regional Employment Board of Lampung Province?

The purpose of this study was to determine the effect of functional supervision of the effectiveness of the implementation of the Regional budget Regional Employment Board on Lampung Province.

The analytical tool used is a qualitative and quantitative analysis. Qualitative analysis by using the formula set forth in the class interval frequency distribution form, further quantitative analysis using the formula product moment correlation and simple linear regression.

The Based on results of research and discussion can be drawn the conclusion that the functional supervision has a positive and significant relationship with the effectiveness of the implementation of the budget amounted to 0.742, is at the level of closeness in a strong criteria. Functional oversight positive and significant impact on the effectiveness of the implementation of the budget, with student t test results, obtained price t_{count} 6.736, when compared with the $t_{table} = 2.042$, then $t_{count} (6.736) > t_{table} (2.042)$. To see significant can be seen that the value of significance (Sig. 0,000) is smaller than the Sign. = 0.05.

Keywords: Functional Supervision, Budget Implementation, Regional Employment Board

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Selama masa Orde Baru, harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak sendiri ternyata semakin jauh dari kenyataan, yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dampak dari sistem Orde Baru menyebabkan pemerintah daerah tidak responsif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakatnya. Pemerintah daerah tidak diberi keleluasaan untuk menentukan kebijakan sendiri, otonomi yang selama ini diberikan tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional dan pembiayaan yang adil. Akibatnya yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, tetapi justru ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah, yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal dalam satu periode anggaran (Halim, 2002:24). Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam setiap tahapannya memerlukan data yang lengkap dan akurat agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan realisasi dengan berpedoman pada aktivitas keuangan yang sudah disepakati, direncanakan dan disahkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga jika terjadi pergeseran atau perubahan harus melalui kaidah yang berlaku.

Untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, maka diperlukan adanya fungsi pengawasan karena pengawasan itu sendiri adalah suatu usaha untuk menjamin adanya penyelenggaraan tugas pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu juga fungsi pengawasan ditujukan untuk menjamin keamanan atas kekayaan dan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk tercapainya sasaran tersebut maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai wujud tanggung jawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna dan pengendalian (Mardiasmo, 2002:14). Upaya yang dilakukan

oleh pemerintah daerah adalah melakukan pengawasan fungsional terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya sendiri.

Pengawasan fungsional sebagai bentuk kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Guna menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peningkatan pendayagunaan aparatur negara dalam memberantas adanya unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2010) dengan judul Efektivitas Pengawasan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, dalam penelitian tersebut permasalahan yang diangkat yaitu apakah efektivitas pengawasan fungsional berpengaruh terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah (2009) tentang Pengaruh Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Cimahi, dengan mengangkat permasalahan yaitu seberapa besar pengaruh Pengawasan Fungsional Intern terhadap Pelaksanaan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pemerintah Kota Cimahi.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada ruang lingkup tempat dan waktu, indikator-indikator dalam variabel penelitian, serta besarnya jumlah populasi dan sampel yang menjadi subyek penelitian. Selain hal tersebut, kuisisioner dalam penelitian ini dikembangkan sendiri oleh penulis berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian.

Berlandaskan pada kedua penelitian di atas, penulis ingin mengetahui secara lebih lanjut pengaruh dari pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kaitannya dengan efektivitas pelaksanaan APBD yang telah dianggarkan. Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai pengawasan fungsional dan pengaruhnya terhadap efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung”.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung?”.

2. Landasan Teori

2.1. Pengawasan Fungsional

Pengertian pengawasan fungsional berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa: “Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian pengusutan, dan penilaian”.

Adapun pengertian pengawasan fungsional pemerintah daerah menurut Nurcholis (2007:312) menyatakan bahwa: “Pengawasan fungsional pemerintah daerah adalah pengawasan terhadap pemerintahan daerah yang dilakukan secara fungsional baik dilakukan oleh departemen sektoral maupun departemen yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri)”.

2.2. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif sering diartikan sama dengan efisien, padahal keduanya mempunyai perbedaan. Admosudihardjo (1987:170) menyatakan bahwa: “Kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumberdaya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu, dan kita berbicara tentang efektivitas bilamana kita

hendak menekankan pada hasilnya atau efeknya, artinya sampai dimana prapta (obyektif) kita itu dapat di capai”.

Sumarsono (2010:121) mengemukakan bahwa pelaksanaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Mardiasmo (2002:14) mengemukakan bahwa tujuan dari pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) meliputi:

- a. Tanggung jawab.
- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan.
- c. Kejujuran.
- d. Hasil guna.
- e. Pengendalian.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, karena dalam penelitian ini menggunakan dua variabel. Metode eksplanasi adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan dua variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang kemudian menjelaskan hubungan atau pengaruh kedua variabel tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu analisis kualitatif dan analisis

kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu untuk menganalisis variabel univariat dari masing-masing variabel digunakan Tabel Distribusi Frekuensi, sedangkan analisis kuantitatif yang digunakan terdiri dari analisis korelasi product moment dan analisis regresi linier sederhana.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Uji Validitas Instrumen Penelitian

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Fungsional

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Simpulan
1	0,559	0,316	Valid
2	0,836	0,316	Valid
3	0,583	0,316	Valid
4	0,481	0,316	Valid
5	0,635	0,316	Valid
6	0,658	0,316	Valid
7	0,763	0,316	Valid
8	0,681	0,316	Valid
9	0,784	0,316	Valid
10	0,746	0,316	Valid

Berdasarkan hasil analisis untuk 39 responden dengan taraf signifikansi 5% diperoleh r_{tabel} sebesar 0,316. Selanjutnya, dari hasil hitung setiap item pernyataan pada variabel pengawasan fungsional seluruh r_{hitung} diperoleh angka lebih besar dari r_{tabel} . Dengan demikian disimpulkan bahwa instrumen yang diujicobakan memiliki validitas (sesuai dengan yang akan diukur).

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Instrumen Efektivitas Pelaksanaan APBD

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Simpulan
1	0,478	0,316	Valid
2	0,576	0,316	Valid
3	0,635	0,316	Valid
4	0,582	0,316	Valid
5	0,548	0,316	Valid
6	0,607	0,316	Valid
7	0,517	0,316	Valid
8	0,573	0,316	Valid
9	0,481	0,316	Valid
10	0,377	0,316	Valid

Berdasarkan hasil analisis untuk 39 responden pada taraf signifikansi 5% diperoleh r_{tabel} sebesar 0,316. Selanjutnya, dari hasil hitung setiap item pernyataan pada variabel efektivitas pelaksanaan APBD seluruh r_{hitung} diperoleh angka lebih besar dari r_{tabel} . Dengan demikian disimpulkan bahwa instrumen yang diujicobakan memiliki validitas (sesuai dengan yang akan diukur).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk seluruh item soal pernyataan valid maka layak untuk digunakan. Artinya, apabila instrumen tersebut digunakan secara berulang kali, maka akan menunjukkan hasil yang valid. Kuesioner dikatakan valid jika kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

4.2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Tabel 7. *Reliability Statistics* Variabel Pengawasan Fungsional

Cronbach's Alpha	N of Items
.908	10

Berdasarkan Tabel 7 hasil pengelolaan data melalui SPSS untuk variabel pengawasan fungsional didapat hasil *Cronbach's Alpha* sebesar $0,908 > 0,60$, sehingga kuisioner pengawasan fungsional dapat dikatakan reliabel.

Tabel 8. *Reliability Statistics*
Variabel Efektivitas Pelaksanaan
APBD

Cronbach's Alpha	N of Items
.835	10

Berdasarkan Tabel 8 hasil pengelolaan data melalui SPSS untuk variabel efektivitas pelaksanaan APBD didapat hasil *Cronbach's Alpha* sebesar $0,835 > 0,60$, sehingga kuisioner efektivitas pelaksanaan APBD dapat dikatakan reliabel.

Hal ini mengandung arti bahwa kuisioner dalam penelitian ini reliabel, artinya kuisioner tersebut akan selalu menghasilkan data yang sama dalam waktu yang berbeda, walaupun responden juga berbeda, atau dengan kata lain, kuisioner tersebut dapat diandalkan dan dipercaya mampu untuk mengumpulkan data.

4.3. Analisis Kualitatif

Berdasarkan pengolahan data terhadap jawaban responden tentang pengawasan fungsional pada Lampiran 2 maka dapat dihitung interval kelas sebagai berikut :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I = Interval Kelas

NT = Nilai tertinggi teoritis = 5

NR = Nilai terendah teoritis = 1

K = Jumlah kategori = 5

$$I = \frac{NT - NR}{K} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Distribusi frekuensi variabel pengawasan fungsional dapat dilihat seperti tabel berikut ini.

Tabel 9. Distribusi Jawaban Responden Tentang Pengawasan Fungsional

No	Kategori	Batas Kelas	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat baik	4,2 – 5	18	46,15
2.	Baik	3,4 – 4,1	17	43,59
3.	Cukup baik	2,6 – 3,3	4	10,26
4.	Kurang baik	1,8 – 2,5	0	0,00
5.	Tidak baik	1 – 1,7	0	0,00
Jumlah			39	100,0

Berdasarkan Tabel 9 di atas diperoleh jawaban 18 responden atau 46,15% menyatakan pengawasan fungsional dalam kondisi sangat baik, 17 responden atau 43,59% menyatakan pengawasan fungsional dalam kategori baik, 4 responden atau 10,26% memberikan tanggapan pengawasan fungsional dalam kategori cukup baik, dan tidak ada responden menyatakan pengawasan fungsional dalam kategori kurang baik maupun tidak baik. Hal ini mengandung arti bahwa pengawasan fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung termasuk dalam kategori “sangat baik”.

Berdasarkan pengolahan data terhadap jawaban responden tentang efektivitas pelaksanaan APBD pada Lampiran 3 maka dapat dihitung interval kelas sebagai berikut :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I = Interval Kelas

NT = Nilai tertinggi teoritis = 5

NR = Nilai terendah teoritis = 1

K = Jumlah kategori = 5

$$I = \frac{NT - NR}{K} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Distribusi frekuensi variabel efektivitas pelaksanaan APBD dapat dilihat seperti tabel berikut ini.

Tabel 11. Distribusi Jawaban Responden Tentang Efektivitas Pelaksanaan APBD

No	Kategori	Batas Kelas	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat efektif	4,2 – 5	15	38,46
2.	Efektif	3,4 – 4,1	19	48,72
3.	Cukup efektif	2,6 – 3,3	5	12,82
4.	Kurang efektif	1,8 – 2,5	0	0,00
5.	Tidak efektif	1 – 1,7	0	0,00
Jumlah			39	100,0

Berdasarkan Tabel 11 di atas diperoleh jawaban 15 responden atau 38,46% menyatakan pelaksanaan APBD dalam kondisi sangat efektif, 19 responden atau 48,72% menyatakan pelaksanaan APBD dalam kategori efektif, 5 responden atau 12,82% memberikan tanggapan pelaksanaan APBD dalam kategori cukup efektif, dan tidak ada responden menyatakan pelaksanaan APBD dalam kategori kurang efektif maupun tidak efektif. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan APBD pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung termasuk dalam kategori “efektif”.

4.4. Analisis Kuantitatif

Berdasarkan output pengolahan data melalui Program SPSS, diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

Tabel 13. *Correlation*

		Y	X
Pearson	Y	1.000	.742
	X	.742	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000
	X	.000	.
N	Y	39	39
	X	39	39

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, diperoleh besarnya nilai product moment (r) = 0,742 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini mengandung arti bahwa hubungan variabel pengawasan fungsional dengan efektivitas pelaksanaan APBD tersebut positif dan signifikan dengan tingkat keeratan dalam kategori kuat.

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai $r = 0,742$ maka besarnya nilai koefisien determinasi $R^2 = (0,742)^2 = 0,551$ atau 55,1%. Hal tersebut berarti bahwa pengawasan fungsional mempunyai pengaruh yang kuat terhadap efektivitas pelaksanaan APBD pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Dengan kata lain, variabel pengawasan fungsional menjelaskan perubahan efektivitas pelaksanaan APBD sebesar 55,1% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 17.00, maka diperoleh hasil-hasil sebagai berikut :

$$a = 0,848$$

b = 0,744
t hitung = 6,736
Sign. = 0,000

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat digambarkan dengan persamaan regresi yaitu :

$$Y = 0,848 + 0,744X$$

Regresi ini mengandung arti bahwa apabila pengawasan fungsional ditingkatkan satu unit, maka akan mengakibatkan efektivitas pelaksanaan APBD pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung meningkat sebesar 0,744 unit pada konstanta 0,848.

Uji keberartian koefisien korelasi dilakukan dengan uji student t didapat harga t_{hitung} sebesar 6,736, jika dibandingkan dengan $t_{tabel} = 2,042$, maka $t_{hitung} (6,736) > t_{tabel} (2,042)$. Untuk melihat signifikan dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig. 0,000) ternyata lebih kecil dari Sign. = 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dapat diterima.

5. Simpulan dan Saran

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan interpretasi pada bab terdahulu, terutama hasil analisa data dan uji hipotesis maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan fungsional mempunyai hubungan yang

positif dan signifikan dengan efektivitas pelaksanaan APBD sebesar 0,742, berada pada tingkat keeratan dalam kriteria kuat. Besarnya nilai koefisien determinasi $R^2 = (0,742)^2 = 0,551$ atau 55,1%, mengandung arti bahwa variabel pengawasan fungsional menjelaskan perubahan efektivitas pelaksanaan APBD sebesar 55,1% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

2. Pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan APBD, dimana koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,744 dengan konstanta sebesar 0,848. Hal ini mengandung arti bahwa apabila pengawasan fungsional ditingkatkan satu unit, maka akan mengakibatkan efektivitas pelaksanaan APBD pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung meningkat sebesar 0,744 unit pada konstanta 0,848. Begitu juga dengan hasil pengujian student t, didapat harga t_{hitung} sebesar 6,736, jika dibandingkan dengan $t_{tabel} = 2,042$, maka $t_{hitung} (6,736) > t_{tabel} (2,042)$. Untuk melihat signifikan dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig. 0,000) ternyata lebih kecil dari Sign. = 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dapat diterima.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil analisis data secara kualitatif dan kuantitatif terdapat beberapa hal yang kondisinya belum baik sehingga perlu direkomendasikan untuk perbaikan kebijakan khususnya kebijakan dalam efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut :

1. Dalam hal variabel pengawasan fungsional setelah dilakukan penelusuran instrumen variabel yang mengukur pengawasan fungsional ditemukan item yang skornya paling rendah dibandingkan dengan skor yang lainnya, yaitu pada item nomor 4, tentang setiap pengawasan dilakukan sesuai dengan pengumpulan informasi dari objek yang dipantau, untuk itu segenap pengambil kebijakan maupun pimpinan dari aparat pengawas fungsional, dalam hal ini Inspektorat Provinsi Lampung hendaknya memberikan pengarahan secara intensif kepada aparat pengawas fungsional untuk benar-benar

memperhatikan informasi, data dan bukti-bukti otentik dari objek yang dipantau dalam proses pengawasan di lapangan.

2. Dalam hal variabel efektivitas pelaksanaan APBD setelah dilakukan penelusuran instrumen variabel yang mengukur efektivitas pelaksanaan APBD ditemukan item yang skornya paling rendah dibandingkan dengan skor yang lainnya, yaitu pada item nomor 1, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sudah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pengguna anggaran, untuk itu pimpinan melalui bagian tata usaha keuangan hendaknya memberikan bimbingan dan pembinaan mengenai prosedur penggunaan anggaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing SKPD, sehingga masing-masing pengguna anggaran mampu mempertanggungjawabkan apa yang diembannya.